

PEMERTAHAN BAHASA BALI DAN KONSEP TRI HITTA KARANA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN TRADISIONAL ULU-APAD DI DESA SUKAWANA DESA PAKRAMAN SUKAWANA

Gek Diah Desi Sentana

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

desi_sentana@ihdn.ac.id

Paya Widiata

payawidata40@gmail.com

ABSTRAK

Desa-Desa Tua di Bali (*Bali Aga*) selain mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku secara resmi Indonesia, juga masih mempertahankan sistem pemerintahan tradisional yang mereka miliki. Sistem pemerintahan tradisional tetap mereka gunakan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan adat, dan berkaitan juga dengan prosesi ritual di Desa Bali Aga khususnya Desa Sukawana. Masyarakat Desa Sukawana tentunya sangat bangga karena terlahir dengan keberagaman budaya mereka miliki tersebut. Sistem “*ulu apad*” itulah sebutan untuk sistem pemerintahan tradisional yang menggunakan kekerabatan secara adil dan mampu menyejahterakan masyarakat di Desa Sukawana, Kabupaten Bangli. Mencapai posisi utama dalam sistem pemerintahan *Ulu-Apad* tidaklah mudah, tetapi harus melalui beberapa tahapan, diantaranya harus melangsungkan upacara *Mapiuning Menek Madesa* dan akhirnya tercatat sebagai anggota *Krama Pamugbung* dengan urutan mulai dari posisi paling bawah, hingga akhirnya jika ada Krama yang keluar maka secara otomatis urutan akan naik, maka disini terlihat bagaimanaperubahan struktur itu terjadi. Fungsi Sistem Pemerintahan *Ulu-Apad* terhadap pemertahan konsep *Tri Hita Karana* telah berjalan sesuai posisi masing-masing, dimana *Jero Kubayan* bertindak di bidang *Parahyangan*, *Jero Pengelanan* bertindak di bidang *Pawongan*, dan *Jero Mekel* bertindak di bidang *Palemahan*.

Kata Kunci: Bahasa Bali, Tri Hita Karana, Ulu-apad, Desa Sukawana

I. Pendahuluan

Dalam masyarakat Bali, terdapat dualisme sistem pemerintahan yang menunjuk kepada dua pengertian. Pertama, istilah sistem pemerintahan desa dinas, yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. Kedua, istilah sistem pemerintahan desa pakraman, yaitu sistem pemerintahan desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat (Nantri, 1991:1).Eksistensi desa pakraman di Bali hingga saat ini tetap terjaga bahkan bisa melampaui peran pemerintah desa administrasi dalam pengaruhnya kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pelaksanaan nilai-nilai yang dianut masyarakat Bali yang didasarkan adat-adat keyakinan agama Hindu. Nilai-nilai tersebut dikenal sebagai *Tri Hita Karana* yaitu nilai yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana struktur dan dinamika struktur pada sistem pemerintahan *Ulu-Apad* di Desa Pakraman Sukawana, Bangli, Bali. (2) Untuk mengetahui bagaimana fungsi sistem pemerintahan *Ulu-Apad* di Desa Pakraman Sukawana, Bangli, Bali. Penelitian ini menghasilkan temuan, antara lain: (1) Struktur Sistem Pemerintahan *Ulu-Apad* di desa Pakraman Sukawana berdasarkan konsep *Rwabineda (Kiwa-Tengen)* yang mengutamakan senioritas perkawinan, (2) Dinamika Struktur Sistem Pemerintahan *Ulu-Apad* berdasarkan urutan (senioritas).

Sebagai suatu sistem, sistem pemerintahan *Ulu-Apad* memiliki struktur tersendiri sesuai dengan konsep *Rwabineda*. Dimana susunan pemerintahannya terdiri dari Penghulu Desa atau *Dulun Desa*, yaitu *Jero Kubayan*, *Jero Bahu*, *Jero Singgukan*, *Jero Penakehan*, *Jero Pengelanan*, dan empat orang Kelian Desa (*Penyarikan*). Sesuai dengan konsep Ideologi *Rwabineda* atau struktur serba dua (dualisme) maka desa pakraman yang menggunakan sistem pemerintahan *Ulu-Apad* memiliki dua Penghulu Desa atau *Dulun Desa* yaitu *Krama Tuwaan* (Krama yang lebih tua) dan *Krama Nyomanan* (Krama yang lebih muda). Dengan demikian sangat penting bagi mereka untuk mengetahui dan mengenal sistem pemerintahan yang ada di desanya yaitu sistem pemerintahan *Ulu-Apad* sehingga nantinya sistem pemerintahan tradisional yang sudah ada sejak dulu tersebut tidak hilang seiring dengan perkembangan jaman.

II. Pembahasan

A. Sistem Pemerintahan *Ulu Apad*

Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia yaitu kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, dan kata “pemerintah” yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah atau pun memutuskan kebijakan tertentu. jika diartikan dari arti katanya, maka **pengertian sistem pemerintahan** merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan/memberikan perintah. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Suatu sistem pemerintahan harus disempurnakan untuk melancarkan jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan maupun kinerja aparatur negara dan aparat pemerintah di dalam menyejahterakan dan melayani rakyat (Suparman, 2012:13).

Menurut Gede Wiratmaja Karang sistem pemerintahan yang ada di Desa-desa tua di Bali atau lebih dikenal dengan sebutan *Bali Aga* yaitu sistem pemerintahan tradisional *Ulu Apad* atau juga dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan *Ulu Ampah*, karena nama yang digunakan di setiap desa tersebut berbeda tetapi jika dimaknai artinya sama. Desa-desa *Bali Aga* atau *Bali Mula* yang lebih dominan menggunakan sistem pemerintahan secara tradisional yang sudah diturunkan oleh nenek moyangnya. Pemerintahan Desa Pakraman yang ada di masing-masing desa di Bali dapat dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan berdasarkan sistem *Ulu-Apad* yang dipimpin oleh *Jero Kubayan* dengan wakilnya *Jero Kubahu*, dan pemerintahan Bali dataran yang dipimpin oleh *Jero Bendesa*.

B. Struktur Sistem Pemerintahan UluApad

Kehidupan sosial di masing-masing desa tidaklah berbeda dengan desa *Bali Aga* lain pada umumnya, di setiap desa mengenal desa pakraman yang lazim disebut *Krama Adat*, *Krama adat* adalah keluarga yang memeluk Agama Hindu yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, termasuk pendatang dari desa lain yang bertempat tinggal dan bergabung di desa tertentu. Susunan sistem pemerintahan Desa Pakraman *Ulu-Apad* terdiri dari: Penghulu Desa (*Dulun Desa*), yaitu *Jero Kubayan*, *Jero Bahu*, dibantu oleh *Jero Singukan*, *Jero Penakehan*, *Jero Pengelan*, dan empat orang kelian desa (*Penyarikan*).

Ideologi *Rwabhineda* dikembangkan oleh Rsi Markandeya. Desa Sukawana memiliki dua *Dulun Desa*, yaitu *Krama Tuwaan* (*Krama* yang lebih tua) dan *Krama Nyomanan* (*Krama* yang lebih muda), pembagian *Krama* ini berdasarkan konsep *Rwabhineda* atau *Kiwa-Tengen*. *Krama Tuwaan* dan *Krama Nyomanan* ini biasanya dibagi berdasarkan silsilah keluarga masing-masing *Krama*.

Krama Dulun Des terdiri dari: kelompok *Jero Kubayan Mucuk* (*Krama Tuwaan*) dan kelompok *Jero Kubayan Kiwa* (*Krama Nyomanan*). Pada suatu sistem tentu mereka memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan jabatannya, untuk tugas yang harus dilaksanakan biasanya telah diatur dalam *Awig-awig* (peraturan di suatu desa). Dalam sistem pemerintahan *Ulu-Apad* *Krama Telu Likur* yang berjumlah 23 KK di desa *Bali Aga*, pastinya melaksanakan sebuah rapat atau dalam istilah Bahasa Balinya *sangkepan*. Dalam pelaksanaan rapat (*sangkepan*) dilaksanakan pada saat Bulan Purnama dan Tilem, yang dilaksanakan setiap lima belas hari. Untuk *sangkepan* rahina *Coma Kliwon*, dan *Nemu Gelang* dilangsungkan sehari dalam setahun. Pemimpin dalam *sangkepan* ini adalah *Jro Kubayan* bersama *Krama Telu Likur*. Keamanan desa, upacara-upacara yang akan berlangsung, peristiwa atau berita yang tengah beredar di masyarakat adalah hal-hal yang dibahas dalam setiap *sangkepan* (rapat). Hal ini membuktikan bahwa dari jaman desa *Bali Aga* Sukawana berdiri, kontroling selalu dilakukan oleh pemuka adat bersama krama desa, sehingga ketertiban, kedamaian dan keamanan selalu terjaga. Selain itu bahasa *Bali Aga* Sukawana juga selalu digunakan dalam setiap rapat dan ritual adat di desa tersebut.

C. Sistem Kekerabatan dan Konsep Tri Hita Karana pada Pemerintahan Tradisional Ulu-Apad

Dalam suatu struktur pemerintahan akan ada dinamika atau proses yang terus berkembang dan membuat interaksi antara satu anggota dengan yang lain. Sistem Kekerabatan sangat diutamakan dalam sistem pemerintahan *Ulu-Apad*. Untuk sampai ke posisi utama atau menjabat sebagai *Jero Kubayan* harus melalui beberapa proses, proses tersebut diawali dengan tingkat usia kecil yang ditandai dengan masuk sebagai anggota *Truna Desa* (*Muda-Mudi*) yang kemudian melakukan pernikahan dan melakukan upacara *Mapiuning Menek Madesa* yang biasanya dilaksanakan pada saat Piodalan *Ngusaba Desa* yang dilaksanakan pada hari Purnama Sasih Kalima, sehingga menyebabkan kenaikan tingkat menjadi anggota *Krama Pamugbung* yang dimulai pada tingkatan paling bawah, jika posisi diatas ada yang kosong secara otomatis akan naik ketingkat selanjutnya.

Setelah usai *Ngayah* atau mengabdikan sebagai *Jero Saya Nitik* barulah dianggap sah sebagai anggota *Krama Telu Likur* yang diawali dengan menjabat sebagai *Jero Kelian* dan begitu juga dengan anggota *Krama Telu Likur* lainnya akan terus naik ketingkat selanjutnya dimana *Jero Kelian* sebelumnya yang ada pada urutan pertama akan naik jabatannya menjadi *Jero Pengelan*, kemudian *Jero Pengelan* yang berada pada urutan pertama akan naik jabatannya menjadi *Jero Penakehan*, begitu pula dengan jabatan *Jero Singukan*, *Jero Kubahu* dan sampai pada jabatan *Jero Kubayan*. Kenaikan tingkat ini ditandai dengan dilangsungkannya upacara *Masaksi* (ritual bersaksi dihadapan leluhur dan masyarakat desa Sukawana) dan yang menjadi saksi adalah *Jero Kubayan Tuwaan* dan *Jero Kubayan Nyomanan*.

Implementasi konsep *Tri Hita Karana* dalam ajaran Agama Hindu yang berasal dari kata “*Tri*” yang berarti tiga, “*Hita*” yang berarti kebahagiaan dan “*Karana*” yang berarti penyebab. Dengan demikian *Tri Hita Karana* berarti “Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan”. Tiga penyebab kebahagiaan itu meliputi: 1) *parhyanganyaitu* keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, 2) *palemahanyaitu* keharmonisan hubungan antara sesama manusia, dan 3) *pawonganyaitu* keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Penanaman konsep *Tri Hita Karana* tentunya memiliki tujuan bagi yang melaksanakan ritual tersebut yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian pula dalam sistem pemerintahan tradisional *Ulu-Apa* yang sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat Desa Sukawana. Implementasi ajaran *Tri Hita Karana* terdapat pada adanya tiga pemuka adat utama yaitu *Jero Kubayan*, *Jero Pengelanan*, dan *Jero mekel*. *Jero Kubayan* bertindak di bidang *Parahyangan*, seperti memimpin upacara ritual. *Jero Pengelanan* bertindak di bidang *Pawongan*, seperti halnya memimpin rapat atau pun membantu warga menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. *Jero Mekel* bertindak di bidang *Palemahan*, meliputi penjagaan alam dan lingkungan di Desa Sukawana. Penghormatan terhadap sistem kekerabatan dan pemertahanan konsep *Tri Hita Karana* di Desa Sukawana menjadikannya sebagai salah satu desa Bali Aga yang tertib, aman, lestari dan damai.

III. Penutup

Desa Pakraman yang ada di Bali terdapat dualisme sistem pemerintahan desa yaitu Sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan sistem pemerintahan *Ulu-Apad* yang diketuai oleh *Jero Kubayan* dan sistem pemerintahan Bali Dataran atau moderen yang dikepalai oleh *Jero Bendesa Adat*. Seperti pada umumnya desa-desa tua (*Bali Aga*) di Bali, desa Pakraman Sukawana untuk penentuan kepemimpinannya menganut sistem kepemimpinan *Ulu-Apad*.

Kepemimpinan *Ulu-Apad* ditentukan menurut usia perkawinannya (*Senioritas*) yang berada pada urutan pertama akan menduduki posisi teratas (*Tetua Desa*) pada urutan *Krama Telu Likur*. Yang membuat sistem pemerintahan ini menjadi unik adalah tidak adanya proses pemilihan untuk menjabat sebagai ketua (*Jero Kubayan*) semuanya harus melewati proses kekerabatan siapa yang tertua dalam sistem kekerabatan maka dia yang akan menjabat ketua.

Untuk mencapai posisi teratas pada *Krama Telu Likur* harus melalui beberapa proses, diawali dengan menjadi anggota dari Teruna Desa dan setelah itu melangsungkan upacara pernikahan sehingga masuk kedalam anggota *Krama Pamugbung* yang diawali dari posisi paling bawah. Namun lambat laun setelah anggota dari *Krama Telu Likur* ada yang menjadi *Krama Baki*, dan *Krama Balu* secara otomatis akan naik keurutan selanjutnya dan begitu seterusnya hingga mencapai posisi teratas. Maka pentingnya generasi muda untuk tetap menjaga maupun melestarikan budaya yang telah ada dan juga berkembang di masing-masing desa yang ada di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Andonis, Tito., dkk. 1994. *Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Asmat di Irian Jaya*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Nantri, Ayu Putu dan I Ketut Sudantra. 1991. “Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga dalam Desa Adat Gianyar”. Denpasar: Laporan Penelitian, Universitas Udayana.
- Noviantara, I Putu Eka. 2004. “Sistem Pemerintahan Ulu-Apad Di Desa Pakraman Sukawana, Bangli, Bali”. Singaraja: Laporan Penelitian, Undiksha.
- Suparman. 2012. *Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Balai Pustaka.